



LAPORAN FGD PANJA ORGANISASI INTERNASIONAL

“MENGOPTIMALKAN PERAN PARLEMEN DALAM AKSESI INDONESIA KE OECD”

Tangerang Selatan,
26 Juni 2025





LAPORAN
FOCUS GROUP
DISCUSSION (FGD)

**“MENGOPTIMALKAN
PERAN PARLEMEN DALAM
AKSESI INDONESIA KE
OECD”**

26 Juni 2025
Tangerang Selatan - Banten



“MENGOPTIMALKAN PERAN PARLEMEN DALAM AKSESI INDONESIA KE OECD”

Laporan FGD Panja Organisasi Internasional

“Mengoptimalkan Peran Parlemen dalam Akses Indonesia ke OECD”

Tangerang Selatan, 26 Juni 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini tengah menapaki fase penting dalam hubungan internasionalnya melalui proses akses ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Keanggotaan dalam OECD tidak hanya menjadi simbol dari pengakuan atas kemajuan ekonomi dan tata kelola nasional, tetapi juga membuka akses terhadap jaringan kebijakan global, standar internasional, dan praktik terbaik dalam berbagai sektor seperti perpajakan, investasi, pendidikan, hingga digitalisasi pemerintahan. Pada bulan Februari 2024, OECD secara resmi mengesahkan *Roadmap for the Accession of Indonesia*, yang menjadi dasar evaluasi kebijakan oleh lebih dari 20 komite tematik OECD terhadap kesiapan Indonesia (OECD, 2024). Pada tanggal 3 Juni 2025, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyerahkan Initial Memorandum kepada Sekjen OECD sebagai bagian dari persyaratan Indonesia dalam proses akses OECD (Kemenko Perekonomian, 2025).

Namun, akses ke OECD tidak dapat hanya ditopang oleh eksekutif semata. Dalam sistem demokrasi, parlemen memiliki peran strategis dan multidimensi, baik dalam memberikan legitimasi politik terhadap kebijakan publik maupun dalam melakukan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan atas reformasi yang dipersyaratkan. Banyak negara anggota OECD melakukan kerja sama intensif antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan keberhasilan proses akses dan pasca-keanggotaan (OECD, 2023). Oleh karena itu, penting bagi parlemen Indonesia untuk mengambil posisi aktif dan terus terinformasikan dalam setiap tahapannya.

Hal ini diperkuat dengan disorotnya reformasi struktural di Indonesia sebagai hal yang krusial untuk mengakselerasi pertumbuhan dalam OECD Economic Outlook terbaru (2025). Sejumlah isu yang disorot adalah kepemilikan modal asing di sektor telekomunikasi dan transportasi; investasi di sektor iklim yang terdampak oleh tumpang tindih regulasi, implementasi kebijakan dan koordinasi yang terbatas; upaya mengatasi malnutrisi di anak-anak yang

meski telah berusaha diatasi melalui Makanan Bergizi Gratis diharapkan dapat lebih menjangkau rumah tangga yang lebih rentan supaya lebih tepat sasaran; pekerja informal; perpajakan; hingga persoalan cuti ibu hamil yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan. Bersama ratifikasi Konvensi Anti Suap OECD, isu-isu ini tidak dapat dipungkiri termasuk di dalam sejumlah hal yang akan diperhatikan oleh komisi-komisi OECD yang bertugas melakukan review atas kesiapan akses Indonesia.

Hal ini diperkuat dengan disorotnya reformasi struktural di Indonesia sebagai hal yang krusial untuk mengakselerasi pertumbuhan dalam OECD Economic Outlook terbaru (2025). Sejumlah isu yang disorot adalah kepemilikan modal asing di sektor telekomunikasi dan transportasi; investasi di sektor iklim yang terdampak oleh tumpang tindih regulasi, implementasi kebijakan dan koordinasi yang terbatas; upaya mengatasi malnutrisi di anak-anak yang meski telah berusaha diatasi melalui Makanan Bergizi Gratis diharapkan dapat lebih menjangkau rumah tangga yang lebih rentan supaya lebih tepat sasaran; pekerja informal; perpajakan; hingga persoalan cuti ibu hamil yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan. Bersama ratifikasi Konvensi Anti Suap OECD, isu-isu ini tidak dapat dipungkiri termasuk di dalam sejumlah hal yang akan diperhatikan oleh komisi-komisi OECD yang bertugas melakukan review atas kesiapan akses Indonesia.



Suasana FGD Panitia Organisasi Internasional BKSAP DPR RI. Dok: BKSAP

Menyikapi hal tersebut, keterlibatan parlemen secara dini berkontribusi terhadap percepatan proses harmonisasi regulasi yang diperlukan dan peningkatan kualitas tata kelola. Hal ini menjadi penting bagi Indonesia, mengingat banyak kebijakan yang tengah dievaluasi OECD justru berada



dalam yurisdiksi atau pengaruh legislasi DPR RI, seperti kebijakan lingkungan, antikorupsi, kebijakan fiskal, dan keterbukaan informasi publik.

Dengan demikian, sinergi antara DPR RI, Kementerian Luar Negeri selaku koordinator diplomasi multilateralisme, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pemimpin teknis reformasi struktural, serta OECD Indonesia sebagai mitra institusional, menjadi sangat penting. Untuk itu, BKSAP DPR RI memandang perlu diselenggarakan sebuah forum dialog terbatas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang akan mempertemukan pemangku kepentingan strategis tersebut, untuk menyelaraskan persepsi, memperdalam pemahaman, serta membangun agenda kolaborasi konkret.

B. Dasar Kegiatan

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Panja Organisasi Internasional berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/KU.02.02/ST/KSOI/6/2025.

C. Peserta dan Panelis FGD

Susunan peserta FGD Panja Organisasi Internasional (Panja OI), sebagai berikut:

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Ravindra Airlangga	F. Golkar	Wakil Ketua BKSAP / Ketua Panja OI
2.	Trinovi Khairani, B.A.	F. Golkar	Anggota BKSAP / Anggota Panja
3.	Abraham Sridjaja, S.H., M.H., C.L.A	F. Golkar	Anggota BKSAP / Anggota Panja
4.	Ruby Chairani Syiffadia, B.A. (Hons)., M.Sc.	F. Gerindra	Anggota BKSAP / Anggota Panja
5.	G. Budisatrio Djiwandono	F. Gerindra	Anggota BKSAP / Anggota Panja
6.	Dr. Hj. Arzeti Bilbina Setyawan, S.E., M.A.P.	F. PKB	Anggota BKSAP / Anggota Panja
7.	Dr. drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si.	F.PAN	Anggota BKSAP / Anggota Panja
8.	Surya Utama, S.I.P.	F.PAN	Anggota BKSAP / Anggota Panja

9.	Dr. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M.	F. Demokrat	Anggota BKSAP / Anggota Panja
----	--	-------------	----------------------------------

Panelis atau narasumber dari FGD ini adalah:

No.	Nama	Jabatan
1.	Tri Tharyat	Direktur Jendral Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri
2.	Edi Prio Pambudi	Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3.	Massimo Geloso Grosso	Head of Jakarta Office (Indonesia and ASEAN) OECD Global Relations and Cooperation

D. Tujuan Kegiatan

Focus Group Discussion ini diselenggarakan dengan tujuan;

1. Meningkatkan pemahaman anggota parlemen tentang pentingnya akses OECD dan dampaknya terhadap kebijakan nasional.
2. Menjelaskan posisi Indonesia dalam proses accession review dan komitmen yang dibutuhkan dalam konteks legislatif.
3. Mengidentifikasi tantangan dan peluang bagi parlemen dalam mengadopsi prinsip-prinsip OECD, seperti rule of law, policy coherence, dan integrity frameworks.
4. Mendorong pembentukan platform kerja bersama antara DPR RI dan mitra kementerian/lembaga terkait dalam mendukung reformasi berbasis standar OECD.
5. Merumuskan rencana aksi parlemen yang bersifat lintas komisi dan multisektor untuk mendukung keberhasilan akses.

E. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Serangkaian persiapan Focus Group Discussion (FGD) ini dilakukan setelah Pimpinan DPR RI memberikan persetujuannya pelaksanaan kegiatan. Bahan-bahan masukan dan poin intervensi disiapkan oleh tenaga ahli BKSAP DPR RI setelah mendapatkan masukan dari kementerian dan lembaga terkait.



II. ISI LAPORAN

A. Agenda Kegiatan

Kegiatan ini diselenggarakan dengan format sebagai berikut:

Nama Kegiatan	:	Focus Group Discussion: “Mengoptimalkan Peran Parlemen dalam Akses Indonesia ke OECD”
Waktu	:	09.00 WIB - selesai
Tempat	:	Tangerang Selatan
Hari, Tanggal	:	26 Juni 2025
Format Acara: Sesi I – Pembukaan dan Paparan Narasumber Sesi II – Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab Sesi III – Rumusan Rekomendasi dan Penutup		

B. Jalannya Diskusi

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bapak Ravindra Airlangga sembari membuka jalannya diskusi menyampaikan bahwa Focus Group Discussion (FGD) ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mendukung proses akses Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Akses ini bukan hanya perjalanan diplomasi, tetapi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tatanan global melalui adopsi standar dan praktik internasional terbaik di berbagai sektor. Pada tanggal 3 Juni 2025, Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara resmi telah menyerahkan Initial Memorandum kepada Sekretaris Jenderal OECD, yang menjadi tonggak penting dalam proses akses tersebut.

Keberhasilan akses ini memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran penting DPR RI dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. FGD ini bertujuan membangun kesamaan pandangan, memperdalam pemahaman, dan merancang kolaborasi konkret antara legislatif dan eksekutif. Forum ini diharapkan menjadi wadah dialog produktif yang memperkuat sinergi serta mendorong percepatan reformasi dan harmonisasi kebijakan yang diperlukan dalam proses akses Indonesia ke OECD.

1. Paparan dari panelis

- a. **Mr. Massimo Geloso Grosso, PhD** (Head of Jakarta Office (Indonesia and ASEAN) OECD Global Relations and Cooperation)



Head of Jakarta Office OECD Global Relations and Cooperation Mr. Massimo Geloso Grosso, PhD menjadi salah satu narasumber FGD Panja Organisasi Internasional. Dok: BKSAP

Mr. Grosso menyampaikan, kualitas Nota Kesepahaman Awal Indonesia sangat baik, mencerminkan kerja keras pemerintah Indonesia dan merupakan tonggak penting. OECD memberikan beberapa rekomendasi, namun lebih kepada diskusi dan mencari jalan untuk memperbaiki kondisi Indonesia dan cara memenuhi persyaratan.

Manfaat dari akses ini adalah membantu Indonesia keluar dari perangkap pendapatan menengah dan mendorong kemajuan pembangunan, serta reformasi struktural, agar menjadi tujuan investasi yang lebih menarik.

Peran parlemen dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan komitmen politik yang demokratis dan transparan. Kebijakan, peraturan, dan keputusan utama berada di tangan parlemen. Sesi ini akan membantu parlemen mendapatkan informasi yang baik mengenai OECD. Perlu kerja lintas komisi untuk membantu akses Indonesia.

- b. **Bapak Tri Tharyat** (Direktur Jendral Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri)

(Beberapa informasi yang disampaikan bersifat tertutup dan diharapkan tidak keluar ke publik)



Bapak Tri Tharyat menyampaikan bahwa sempat ada tentangan negara-negara berkembang untuk bergabung dengan OECD. Beberapa negara berkembang melobi untuk tidak naik level ke negara maju. Namun Indonesia ingin maju dan mulai menjadi negara *partner countries* Indonesia.

Kebijakan strategis Indonesia disampaikan di St. Petersburg, Dimana Indonesia tetap melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia baru saja menjadi anggota BRICS, Dimana Indonesia baru saja mengajukan keinginan untuk masuk OECD. Sering kali BRICS dan OECD dibentur-benturkan oleh narasi negatif media, namun hal itu tidak benar. Masuknya Indonesia ke BRICS dan OECD dianggap sebagai Strategi yang cerdas dan politik yang terbuka, oleh Presiden Perancis.



Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat menyampaikan beberapa tantangan ketika bergabung ke OECD. Dok: BKSAP

Keterlibatan Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2007, kantor OECD di Indonesia adalah kantor OECD di luar Paris. Keputusan OECD merupakan sistem konsensus, sempat terbentur dengan isu Israel baik implikasi terhadap penolakan Indonesia ataupun Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. OECD memberikan guidelines tetapi tidak akan ikut campur keputusan nasional, ataupun yang telah diatur oleh perjanjian internasional. Yang perlu perhatian, ada kekhawatiran ada negara yang mem-blok penerimaan Indonesia. Namun, langkah di dalam negeri adalah kunci termasuk peran dari DPR RI.

Proses aksesi tergantung negara, bisa cepat ataupun lama. Latvia perlu 3 tahun, dan Korea Selatan butuh waktu 7 tahun untuk aksesi. Proses

aksesi Russia dihentikan pada tahun 2015 dikarenakan perang dengan Ukraina.

c. **Edi Prio Pambudi** (Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

Dalam paparannya Bapak Edi menyebutkan untuk menjadi negara maju bukan pada PDB tetapi HDI (*Human Development Index*), tetapi kenyataan PDB Indonesia tinggi tetapi HDI masih rendah. BPS diminta untuk memotret kondisi masyarakat dan memperbaikinya.



Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi saat menjadi panelis FGD Panja Organisasi Internasional. Dok: BKSAP

Pada proses pengajuan Indonesia untuk akses, AS dan Israel meragukan Indonesia. Sempat ada permintaan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik, tetapi Indonesia menolak dan masuknya ke OECD terkait ekonomi dan tidak politik. OECD membutuhkan negara berkembang untuk belajar bagaimana perkembangan dari negara berkembang ke negara maju dijalankan. Initial memorandum berisi self-assessment sekitar 240 standar, 32 bagian, dan melibatkan 64 pihak termasuk DPR, masyarakat sipil, Kementerian dan lembaga. Beirisi kondisi Indonesia 95% sudah align dengan standar OECD. 5% membutuhkan peran parlemen dalam memenuhinya.

Amandemen UU Anti Korupsi terkait cross border (Ratifikasi Anti Bribery Convention), kebijakan fiscal affairs terhadap suap luar negeri, statistic yang lebih objektif. Ada matrix tracker untuk melakukan teknikal



review, terutama regulasi yang memerlukan amandemen (proses perancangan/amandemen yang cukup panjang dan agar bisa masuk prolegnas). Parlemen dalam fungsi pengawasan, diskusi, dan fact-finding mission terhadap self-assessment pemerintah.

2. Sesi tanya jawab

a. Pertanyaan dari Anggota Panja Organisasi Internasional

Pada sesi ini para anggota Panja diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan pandangan terkait akses OECD. Ibu Ruby Chairani Syiffadia menyatakan perlu komunikasi yang intens antara DPR RI dan Pemerintah. Ibu Dewi Coryati menyampaikan agar menjadi catatan bagi DPR RI terutama untuk Komisi X untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ibu Tri Novi Khairani menyampaikan pertanyaan tentang bagaimana parlemen dapat memastikan bahwa regulasi yang diformulasikan tetap mementingkan kepentingan masyarakat rentan tetapi juga sesuai dengan standar internasional.



Anggota Panja Organisasi Internasional BKSAP DPR RI sekaligus peserta FGD aktif berdiskusi dengan panelis. Dok: BKSAP

Bapak Surya Utama menanyakan terkait sektor anggaran negara dan proyek pengadaan barang dan jasa masih menjadi lahan rawan korupsi di Indonesia. Indonesia telah memiliki serangkaian undang-undang terkait dengan penanganan Tindak Pidana Korupsi. Langkah apa yang dapat dilakukan parlemen dalam penyelarasan regulasi UU Tipikor ini dengan Konvensi Anti-Bribery OECD dan juga untuk memperkuat sistem pengawasan anggaran agar selaras dengan prinsip-prinsip anti-korupsi dan integritas yang diharuskan oleh standar OECD. Bapak

Ravindra menyampaikan beberapa pertanyaan yakni: dengan akses ini, perkiraan HDI Indonesia akan naik ke rank berapa dan apakah [pengambilan kebijakan penerimaan Indonesia apakah dipengaruhi dengan pengakuan Israel?

b. Jawaban Panelis atas pertanyaan Anggota Panja Organisasi Internasional

Bapak Tri Tharyat: OECD pengambilan keputusan secara konsensus, dan sejauh ini semua negara anggota OECD mengakui dan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Terkait dengan Anti Bribery memang pekerjaan berat bagi Indonesia dalam penerapannya, namun pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Bapak Yusril, bahwa Indonesia siap untuk ratifikasi.

Bapak Edi: Akses market dan investasi 38 negara anggota OECD setara FTA, dan ini semua terkait dengan pasar tenaga kerja, bidang kesehatan. Instrumen OECD yang berhubungan langsung dengan social affairs dan memperbaiki gap dan menjangkau masyarakat luas. Anti Korupsi ini lintas sektor, dan dapat diatasi dari taraf pencegahan, dan akan sulit bagi Indonesia mendapatkan investasi. BPS sedang membenahi indicator untuk menggambarkan HDI dan kondisi pendidikan Indonesia. Akses Kroasia di blok oleh Amerika Serikat di garis akhir karena menerapkan standar EU dalam sistem perdagangan. Perlu juga networking antara parlemen dengan OECD di Paris.

Mr. Massimo: OECD integrating economy and social issues (educations, gender empowerment, etc).



Pimpinan dan Anggota Panja Organisasi Internasional BKSAP DPR RI foto bersama dengan panelis. Dok: BKSAP



III. KESIMPULAN DAN SARAN

Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bapak Ravindra Airlangga, berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan yang relevan dalam proses akses Indonesia ke OECD.

A. Kesimpulan

1. Akses OECD merupakan langkah strategis untuk meningkatkan posisi Indonesia di tingkat global, mempercepat reformasi struktural, dan meningkatkan daya saing nasional.
2. Panelis sepakat bahwa keberhasilan proses akses sangat bergantung pada komitmen lintas sektor, keterlibatan aktif parlemen, dan penyelarasan regulasi dengan standar internasional, khususnya terkait anti-korupsi, tata kelola, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan sosial.

B. Saran

Diskusi ini menyoroti berbagai tantangan yang akan dihadapi Indonesia ketika menjadi Anggota OECD. Untuk itu Panja Organisasi Internasional DPR RI menyarankan;

1. Perlunya membangun komunikasi intensif antara DPR RI dan pemerintah dalam rangka harmonisasi kebijakan.
2. Proses akses ini diakui akan memakan waktu dan membutuhkan kerja konsisten dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari parlemen untuk penyelarasan peraturan perundangan dan penguatan sistem pengawasan.

IV. PENUTUP

A. Anggaran

Rangkaian kegiatan Panja Organisasi Internasional “Mengoptimalkan Peran Parlemen dalam Akses Indonesia ke OECD” yang berlangsung di Tangerang Selatan, 26 Juni 2025 menggunakan mata anggaran MAK: 2025.001030.CF.5805.AEC.001.051.E.524111 sebesar Rp193.127.000,- (Seratus Sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

B. Keterangan dan Lampiran

1. Lampiran bahan paparan
2. Foto Dokumentasi ([link](#))
3. Publikasi Media
 - a. [Sinkronisasi Regulasi jadi Peran Penting DPR dalam Akses OECD](#)
 - b. [Akses OECD Dorong Indonesia Lakukan Reformasi Hukum Anti-Suap dan Regulasi Statistik](#)
 - c. [Surya Utama: Akses OECD Harus Dukung Perluasan Lapangan Kerja Lokal](#)
 - d. [Parlemen Harus Lakukan Penyelarasan Regulasi](#)
 - e. [Mengoptimalkan peran Parlemen dalam Akses Indonesia ke OECD](#)

C. Ucapan terimakasih

Atas nama Tim Panja Organisasi Internasional DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas terlaksananya FGD ini, semoga peran BKSAP DPR RI sebagai peserta dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mendukung dan menunjang program pemerintah di kancah global.

D. Kata penutup

Demikian pokok-pokok laporan Focus Group Discussion (FGD) Panja Organisasi Internasional DPR RI “Mengoptimalkan Peran Parlemen dalam Akses Indonesia ke OECD” yang berlangsung di Tangerang Selatan, 26 Juni 2025, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juli 2025
a.n. Tim Panja OI BKSAP DPR RI
Ketua Panja

Ravindra Airlangga





LAMPIRAN



“MENGOPTIMALKAN PERAN PARLEMEN DALAM AKSESI INDONESIA KE OECD”

Focus Group Discussion

“Mengoptimalkan Peran Parlemen dalam Akses Indonesia ke OECD”

26 Juni 2025 || 09.00 - Selesai

Hotel Trembesi, Tangerang - Banten

JAM	ACARA	KETERANGAN
09.00 – 09.30	Registrasi	
10.00 – 10.15	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	
	Sambutan	<ul style="list-style-type: none">• Ravindra Airlangga, Ketua Panja Ol BKSAP
10.15 – 11.00	Paparan Narasumber “Mengoptimalkan Peran Parlemen dalam Akses Indonesia ke OECD”	<p>Pembicara:</p> <ul style="list-style-type: none">• Massimo Geloso Grosso, PhD. Head of Jakarta Office (Indonesia and ASEAN) OECD Global Relations and Cooperation• Ferry Ardiyanto, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia• Try Tharyat, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI
11.00 – 11.45	Tanya Jawab	
11.45 – 12.00	Kesimpulan dan Penutup	
12.00	Makan Siang	



“MENGOPTIMALKAN PERAN PARLEMEN DALAM AKSESI INDONESIA KE OECD”

TERMS OF REFERENCE (TOR)

Focus Group Discussion (FGD)

“Mengoptimalkan Peran Parlemen dalam Akses Indonesia ke OECD”

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini tengah menapaki fase penting dalam hubungan internasionalnya melalui proses akses ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Keanggotaan dalam OECD tidak hanya menjadi simbol dari pengakuan atas kemajuan ekonomi dan tata kelola nasional, tetapi juga membuka akses terhadap jaringan kebijakan global, standar internasional, dan praktik terbaik dalam berbagai sektor seperti perpajakan, investasi, pendidikan, hingga digitalisasi pemerintahan. Pada bulan Februari 2024, OECD secara resmi mengesahkan *Roadmap for the Accession of Indonesia*, yang menjadi dasar evaluasi kebijakan oleh lebih dari 20 komite tematik OECD terhadap kesiapan Indonesia (OECD, 2024). Pada tanggal 3 Juni 2025, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyerahkan Initial Memorandum kepada Sekjen OECD sebagai bagian dari persyaratan Indonesia dalam proses akses OECD (Kemenko Perekonomian, 2025).

Namun, akses ke OECD tidak dapat hanya ditopang oleh eksekutif semata. Dalam sistem demokrasi, parlemen memiliki peran strategis dan multidimensi, baik dalam memberikan legitimasi politik terhadap kebijakan publik maupun dalam melakukan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan atas reformasi yang dipersyaratkan. Banyak negara anggota OECD melakukan kerja sama intensif antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan keberhasilan proses akses dan pasca-keanggotaan (OECD, 2023). Oleh karena itu, penting bagi parlemen Indonesia untuk mengambil posisi aktif dan terus terinformasikan dalam setiap tahapannya.

Hal ini diperkuat dengan disorotnya reformasi struktural di Indonesia sebagai hal yang krusial untuk mengakselerasi pertumbuhan dalam OECD Economic Outlook terbaru (2025). Sejumlah isu yang disorot adalah kepemilikan modal asing di sektor telekomunikasi dan transportasi; investasi di sektor iklim yang terdampak oleh tumpang tindih regulasi, implementasi kebijakan dan koordinasi yang terbatas; upaya mengatasi malnutrisi di anak-anak yang meski telah berusaha diatasi melalui Makanan Bergizi Gratis diharapkan dapat lebih menjangkau rumah tangga yang lebih rentan supaya lebih tepat sasaran; pekerja informal; perpajakan; hingga persoalan cuti ibu hamil yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan. Bersama ratifikasi Konvensi Anti Suap OECD, isu-isu ini tidak dapat dipungkiri termasuk di dalam sejumlah hal yang akan diperhatikan oleh komisi-komisi OECD yang bertugas melakukan review atas kesiapan akses Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, keterlibatan parlemen secara dini berkontribusi terhadap percepatan proses harmonisasi regulasi yang diperlukan dan peningkatan kualitas tata kelola. Hal ini menjadi penting bagi Indonesia, mengingat banyak kebijakan yang tengah dievaluasi OECD justru berada dalam yurisdiksi atau pengaruh legislasi DPR RI, seperti kebijakan lingkungan, antikorupsi, kebijakan fiskal, dan keterbukaan informasi publik.

Dengan demikian, sinergi antara DPR RI, Kementerian Luar Negeri selaku koordinator diplomasi multilateralisme, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pemimpin teknis reformasi struktural, serta OECD Indonesia sebagai mitra institusional, menjadi sangat penting. Untuk itu, BKSAP DPR RI memandang perlu diselenggarakan sebuah forum dialog terbatas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang akan mempertemukan pemangku kepentingan strategis tersebut, untuk menyelaraskan persepsi, memperdalam pemahaman, serta membangun agenda kolaborasi konkret.

B. Tujuan Kegiatan

FGD ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman anggota parlemen tentang pentingnya akses OECD dan dampaknya terhadap kebijakan nasional.



2. Menjelaskan posisi Indonesia dalam proses accession review dan komitmen yang dibutuhkan dalam konteks legislatif.
3. Mengidentifikasi tantangan dan peluang bagi parlemen dalam mengadopsi prinsip-prinsip OECD, seperti rule of law, policy coherence, dan integrity frameworks.
4. Mendorong pembentukan platform kerja bersama antara DPR RI dan mitra kementerian/lembaga terkait dalam mendukung reformasi berbasis standar OECD.
5. Merumuskan rencana aksi parlemen yang bersifat lintas komisi dan multisektor untuk mendukung keberhasilan aksesi.

C. Agenda dan Format Kegiatan

Kegiatan ini diselenggarakan dengan format sebagai berikut:

1. Nama Kegiatan : Focus Group Discussion: “Mengoptimalkan Peran Parlemen dalam Aksesi Indonesia ke OECD”
2. Hari, Tanggal : 26 Juni 2025
3. Waktu : 09.00 - Selesai
4. Tempat : Hotel Trembesi, Tangerang
5. Format Acara :
 - Sesi I – Pembukaan dan Paparan Narasumber
Sambutan dari pimpinan BKSAP, perwakilan OECD Indonesia, dan Kemlu/Kemenko Perekonomian
 - Sesi II – Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab
Dialog terbuka antara narasumber dan peserta
 - Sesi III – Rumusan Rekomendasi dan Penutup
Penyusunan butir rekomendasi awal dan langkah tindak lanjut
6. Narasumber :
 - Perwakilan Kementerian Luar Negeri RI
 - OECD Indonesia Office
 - Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
7. Peserta :
 - Anggota BKSAP DPR RI dari Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional.
 - Tenaga Ahli BKSAP DPR RI



- Bagian Kerja Sama Internasional, Biro KSAPOI Sekretariat Jenderal DPR RI,
- Perwakilan dari Kemlu RI
- Perwakilan dari Kemenko Perekonomian.
- OECD Indonesia.

8. Output yang Diharapkan

- a) Tersusunnya daftar kontribusi strategis parlemen dalam roadmap akses OECD.
- b) Rekomendasi internal parlemen bagi setiap Alat Kelengkapan Dewan untuk mengawal proses akses Indonesia di OECD.
- c) Rekomendasi sinergi antar-lembaga dalam mendukung reformasi tata kelola nasional sebagai bahan pengawasan Anggota DPR RI.
- d) Identifikasi area legislasi prioritas berdasarkan prinsip dan evaluasi OECD.

D. Penutup

Akses ke OECD bukan semata persoalan teknis, melainkan langkah politik dan institusional menuju reformasi jangka panjang. DPR RI sebagai lembaga demokrasi yang merepresentasikan suara rakyat perlu memainkan peran aktif, tidak hanya dalam mengawasi dan mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan standar OECD, tetapi juga dalam membentuk narasi kebangsaan Indonesia sebagai negara demokratis yang terbuka, inklusif, dan berdaya saing. FGD ini diharapkan menjadi momentum awal untuk membangun ownership bersama atas proses tersebut.

Referensi

1. OECD. (2024). Roadmap for the Accession Process of Indonesia.
2. OECD (2025). OECD Economic Outlook, Volume 2025 Issue 1: Tackling Uncertainty, Reviving Growth. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/83363382-en>
3. Kemenko Perekonomian. (2025). Siaran Pers: Hadiri Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025, Menko Airlangga Lanjutkan Tahapan Akses Indonesia Melalui Penyerahan Initial Memorandum. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6415/hadiri-pertemuan-tingkat-menteri-oecd-2025-menko-airlangga-lanjutkan-tahapan-aksesi-indonesia-melalui-penyerahan-initial-memorandum>





@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY
COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF
REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id